

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH (TPS) BUKIT ASRI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA

Yusrival^{1*}, Muhlis Madani², Nuryanti Mustari³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out the extent to which the successful implementation of waste management policies at TPS Bukit Asri, Polewali Village, Gantarang District, Bulukumba Regency. The research method used qualitative which described a problem that occurs. The data collection techniques used the method of observation, interviews, and document studies with the number of informants as many as 7 people. The results showed that the implementation of the Waste Management Policy at the Bukit Asri TPS had been implemented well, this could be seen from 1. The behavior of organizational relations at the Bukit Asri TPS had been carried out by cooperating, committing, and coordinating with the Bulukumba Regency Spatial Planning Office. 2. The behavior of the lower implementers had also implemented waste management. This seen from three aspects, namely organizational control, work ethic, and work professionalism of TPS managers. 3. The behavior of the target group, namely the community gave a positive response and supported the existence of waste management at the Bukit Asri TPS. Because it was considered very helpful for urban communities, especially in densely populated areas.

Keywords: policy implementation, waste

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu masalah yang terjadi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPS Bukit Asri secara umum telah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari 1. Perilaku hubungan organisasi di TPS Bukit Asri telah dilakukan dengan mengadakan kerjasama, komitmen, dan koordinasi dengan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba. 2. Perilaku implementor bawah juga telah melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kontrol organisasi, etos kerja, dan profesionalitas kerja para pengelola TPS. 3. Perilaku kelompok sasaran yakni masyarakat memberikan respon positif dan mendukung dengan adanya pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri. Karna dianggap sangat membantu masyarakat perkotaan khususnya di daerah padat penduduk

Kata kunci: implementasi kebijakan, sampah

* yusrival@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah dari bawah. Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar maupun di kawasan padat penduduk.

Terhususnya di kawasan padat penduduk Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, keadaan lingkungannya belum dapat dikatakan sehat dan bersih dikarenakan masih terdapat tumpukan - tumpukan sampah dipinggir jalan maupun di lahan lahan yang kosong. Hal ini diakibatkan karna sifat “bodo amat” masyarakat sekitar terhadap urusan sampah dan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan. Permasalahan tersebut masih menjadi faktor utama dalam pengelolaan sampah di lingkungan ini. Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran penting dalam upaya memperbaiki pengelolaan sampah, di mana budaya masyarakat Indonesia terkait pengelolaan sampah masih rendah ini haruslah ditingkatkan

agar kedepannya masalah pemilahan sampah dapat diatasi dari bawah atau dari sumbernya.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui Peraturan Bupati Bulukumba No. 66 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dengan Konsep 3R: Reduce (pengurangan sampah), Reuse (pembatasan timbunan sampah) dan Recycle (pendauran ulang sampah atau pemanfaatan kembali sampah) yang dilaksanakan oleh pihak TPS dengan skala kawasan (Peraturan Bupati Bulukumba, 2017).

Salah satu kebijakan dalam Peraturan Bupati Bulukumba No. 66 Tahun 2017 yaitu pendirian TPS untuk mengelola sampah terkhususnya di daerah padat penduduk dimana masalah sampah tidak ada habisnya jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Serta masalah yang sering ditemukan yaitu kebiasaan masyarakat sekitar yang hanya membuang atau menumpuk sampah disembarang tempat dan juga melakukan pembakaran sampah sehingga dapat menghasilkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat sekitar. Maka dari itu diharapkan dengan adanya TPS Bukit Asri ini dapat mengurangi volume

sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat dengan mengikuti kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah ini haruslah berkerja sama dengan semua elemen baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang paling penting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu.

Perubahan pola konsumsi yang menimbulkan sampah atau sisa kegiatan sehari-hari manusia ini telah banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut terjadi karena pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta belum dikelolanya secara kompherensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat (Kencana, 2016). Sampah bisa menjadi solusi kalau dikelola dengan baik sesuai manajemen sampah, akan tetapi sampah dapat menjadi masalah kalau manajemennya kurang baik sehingga menimbulkan

implikasi lingkungan yang tidak sehat (Djani et al., 2019). Salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan adalah permasalahan sampah. Permasalahan sampah masih menjadi sorotan dan hampir yang terjadi di semua kota di Indonesia mengalamik kendala dalam pengelolaan sampah (Wachid & Caesar, 2021). Sedangkan penelitian ini akan lebih dikembangkan ke arah penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dalam proses mengurai masalah sampah ini, perlu dilakukan aksi konkret oleh semua pihak. Penggalakkan prinsip *eco-living* seperti kebijakan penggunaan kantong belanja dan kemasan produk ramah lingkungan, serta 3R sudah membuktikan adanya upaya pemerintah berkaitan dengan pengelolaan sampah, walaupun perlu untuk terus ditingkatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, konsep pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis (Republik Indonesia, 2008).

Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho 2009:11).

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2009), setiap

pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.

Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Dalam kaitan ini, Dye (2002:1) mengartikan kebijakan publik sebagai “whatever government choose to do or not to do”. Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam buku berjudul *Public Policymaking*, Anderson (2000) pun setuju dengan pandangan Dye tentang makna kebijakan publik sebagai “apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.

Sesuai dengan konsep kebijakan publik di atas, pemerintah dapat melakukan banyak hal, mulai dari mengelola konflik dalam masyarakat, mengorganisasikan masyarakat untuk berkonflik dengan masyarakat lain, mendistribusikan berbagai penghargaan

atau hadiah dan layanan material kepada anggota-anggota masyarakat, hingga menarik uang dari masyarakat yang sering diwujudkan dalam bentuk pajak.

Individu atau masyarakat mengharapkan pemerintah melakukan banyak hal untuknya. Semua kelompok masyarakat pasti menginginkan pemerintah dapat melayani kepentingan mereka dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kebijakan publik harus didesain untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi ketidaknyamanan dan ketidaksenangan individu dan kelompok-kelompok masyarakat (Dye 2002).

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana dan alat untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Adapun pengertian implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter yang dikutip oleh Wahab dalam (Mokodompis et al., 2019) merumuskan proses implmentasi kebijakan sebagai berikut: “Suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika bottom-up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan

lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan. Proses administratif yang dilakukan oleh unit-unit administratif pada setiap level pemerintahan disejalankan dengan tipe-tipe kebijakan yang telah ditetapkan. Tipe-tipe kebijakan tersebut dapat bersifat : distributive, regulatory, selfregulatory, re-distributive” (Anderson, 1978 : 127; Ripley, 1987 : 71).

Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “policy delivery system”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatankegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

METODE

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama

2 bulan lokasi penelitian berada di TPS Bukit Asri karna peneliti melihat bahwa di TPS Bukit Asri masih banyak masalah yang belum dapat diatasi terkait dengan sampah, khususnya sampah rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karna dengan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri peneliti dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis/observasi. Dan menggunakan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Sedangkan jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta

dan sifat-sifat fenomena yang diselidiki. (Sari et al., 2020)

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu peneliti. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap mengetahui tentang apa yang menjadi rumusan masalah peneliti, atau mungkin informan tersebut sebagai penguasa, pemilik, ketua ataupun sebagainya sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek, situasi sosial, serta keadaan sesuatu yang ingin diteliti.

Informan yang dimaksud yaitu informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPS Bukit Asri.

Teknik Pengumpulan Data yang dipakai peneliti untuk mendapatkan data kualitatif yaitu :

Studi dokumen yaitu teknik yang dilakukan dengan mengkaji beberapa dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Dilakukan dengan cara memahami dan mengkaji beberapa dokumen di TPS Bukit Asri yang dianggap penting yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa dalam bentuk arsip foto, buku

harian maupun bulanan yang ada di TPS.

Peneliti menggunakan wawancara secara mendalam serta terstruktur dengan informan penelitian demi mendapatkan penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti, peneliti mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan, yang dianggap siap memberikan data terkait dengan judul penelitian ini.

Observasi yaitu teknik mendapatkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di TPS Bukit Asri yang artinya peneliti akan mendatangi secara langsung dan mengamati kondisi lingkungan sekitarnya, kemudian disusun menjadi data-data hasil pengamatan.

Proses penyelidikan atau analisis informasi dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Untuk memastikan tingkat keabsahan data dari penelitian ini maka digunakan beberapa teknik Triangulasi seperti berikut: Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi Waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri yang diteliti dengan teori keberhasilan implementasi kebijakan Soren C. Winter secara umum sudah berjalan dengan benar dan penanganannya sesuai dengan prosedur pengolahan sampah yang ada hal ini ditandai dengan telah berkurangnya tumpukan sampah di wilayah oprasional TPS Bukit Asri.

Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi

Dari hasil penelitian bahwa perilaku organisasi di TPS Bukit Asri telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah telah terlaksana dengan melihat komitmen dan koordinasi yang ada di TPS Bukit Asri. Setelah melakukan observasi dan wawancara kebeberapa informan peneliti mendapatkan informasi dan data mengenai hubungan antar organisasi yang dimana sejak awal berdirinya TPS Bukit Asri telah berkomitmen dan bekerja sama dengan

Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba untuk membangun TPS dari APBN Kementerian PUPR.

Hal ini ditandai dengan di tanda tangannya surat perjanjian kerja sama pelaksanaan pekerjaan TPS berbasis masyarakat tahun anggaran 2015 antara Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba dengan KSM Bukit Asri sebagai kelompok penerima manfaat.

Setelah diberdirikannya TPS Bukit Asri pengelolaan sampah terus berjalan hingga saat ini walaupun pendapatan dan pemasukan TPS yang tidak seberapa perbulannya. Dengan melihat hal itu maka koordinasi di TPS Bukit Asri ini dapat dikatakan berjalan dengan baik karna setelah 7 tahun berdirinya TPS hingga sekarang masih berjalan dan masih mengelola sampah rumah tangga. Walaupun pada pelaksanaannya banyak masalah yang dihadapi oleh pihak TPS. Akan tetapi komitmen dan tujuan dari awal yang terus dipegang dan ditegakkan oleh pihak TPS demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Sesuai dengan teori Soren C. Winter dalam (Rahmawati, 2020) mengemukakan bahwa proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak cara. Salah satu cara diantaranya adalah implementasi kebijakan dapat terpenuhi dalam suatu organisasi.

Tetapi, agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi, atau bagian-bagian organisasi itu.

Perilaku Birokrasi Level Bawah

Dari hasil penelitian birokrasi level bawah yang dimaksud yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bukit Asri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri. Sehingga diharapkan KSM Bukit Asri ini dapat peka dan memahami akan permasalahan permasalahan sampah di wilayah oprasionalnya sehingga dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Dan juga mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Seperti contohnya sosialisasi tentang fungsi dan tujuan didirikannya TPS Bukit Asri pada awal berdirinya. Sehingga dapat mengajak dan menarik minat masyarakat sekitar agar ikut berpartisipasi dalam mengurangi tumpukan sampah yang berserakan disembarang tempat. Dengan adanya TPS Bukit Asri diharapkan dapat mengurangi tumpukan sampah dengan cara dikelola sesuai metode yang telah

ditentukan. Serta juga mendapatkan nilai jual terhadap sampah yang layak jual seperti sampah kardus, limbah besi dan sampah plastik.

Dapat disimpulkan bahwa perilaku birokrasi level bawah telah dijalankan sesuai yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur(SOP) yang dibuat sebagai panduan pelaksanaan bagi pekerja di TPS dalam menjemput, memilah, dan mengelola sampah yang masuk di TPS. Dan juga perilaku Ketua TPS hingga pekerja yang menjemput sampah ke rumah warga telah bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing masing.

Seperti yang dikemukakan Lipsky;1980, dalam Parawangi (2011) Birokrasi level bawah bekerja dalam situasi yang ditandai dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Mereka berupaya mengatasi permasalahan dan membuat prioritas kebijakan, mengontrol dan memodifikasi tujuan kebijakan berdasarkan persepsi masyarakat. Dan Michael Lipsky (1980) menggambarkan birokrasi level bawah ini sebagai “jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat”.

Perilaku Kelompok Sasaran

Dari hasil wawancara beberapa masyarakat penerima manfaat peneliti menilai respon masyarakat terhadap

TPS Bukit Asri merespon positif serta masyarakat sangat mendukung program ini, karna dapat menghadirkan solusi terhadap persoalan sampah khususnya di pemukiman padat penduduk yang dimana susah dan sulit untuk mendapatkan tempat pembuangan sampah yang benar.

Dengan ada TPS Bukit Asri ini secara tidak langsung dapat mengubah perilaku masyarakat yang dulunya suka membuang sampah sembarangan dan membakar sampah, sekarang telah mengumpulkan sampahnya lalu menunggu pihak TPS untuk menjemput dan mengelola.

Dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan dapat juga memberikan dampak ke kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak pelaksanaan kebijakan yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah yaitu pihak TPS juga baik demikian dengan sebaliknya. Seperti jika respon kelompok sasaran yaitu masyarakat merespon negatif maka kinerja implementor bawah harus dipertanyakan karna tidak menjalankan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah dengan baik.

Dengan dikeluarkanya kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga melalui Peraturan Bupati Bulukumba No.66 Tahun 2017 diharapkan mampu

mengubah perilaku sasaran kebijakan yaitu masyarakat yang dulunya hanya membuang sampah sembarangan tanpa adanya pengelolaan dapat berdampak secara langsung terhadap kebersihan lingkungan dan secara tidak langsung dapat juga menyebabkan terjadinya banjir karna drainase yang tersumbat oleh sampah yang dibuang sembarangan.

Untuk mencapai tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kerja sama dan partisipasi kelompok sasaran yaitu masyarakat sehingga kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yaitu kebersihan dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Bulukumba

Seperti penjelasan Winter : 2003 Variabel perilaku target grup dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif. Dengan demikian, kinerja implementasi program sangat dipengaruhi oleh karakteristik partisipasi yakni mendukung atau menolak. (Rahmawati, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri dapat disimpulkan bahwa :

Perilaku hubungan organisasi di TPS Bukit Asri telah terlaksana dengan melihat komitmen dan koordinasi dengan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bulukumba. Sehingga indikator pertama yaitu Perilaku hubungan antar organisasi telah dijalankan oleh pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bukit Asri dalam merencanakan, membangun, mengelola, serta menjalankan TPS Bukit Asri ini agar dapat mengurangi volume sampah sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Perilaku implementor bawah telah melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 aspek yaitu kontrol organisasi, etos kerja, dan profesionalitas kerja para pengelola TPS. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan kebijakan pengelolaan sampah telah dilaksanakan dan dijalankan oleh pengelola TPS Bukit Asri ini. Dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perilaku kelompok sasaran yakni masyarakat memberikan respon positif dan mendukung dengan adanya

pengelolaan sampah di TPS Bukit Asri. Karna dianggap sangat membantu masyarakat perkotaan khususnya di daerah padat penduduk yang dimana susah untuk mendapatkan tempat pembuangan sampah yang benar.

REFERENSI

- Djani, W., Wadu, J., & Lake, P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. *Journal of Business Studies*, 4(2), pp. 50–67.
- Kencana, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 17–22.
- Peraturan Bupati Bulukumba. (2017). *Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2017* (hal. 1–8). http://nawasis.org/portal/download/digilib/207-Perbup_Bulukumba_2017_66.pdf
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1).
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2008* (hal. 121). <https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-18-tahun-2008-tentang-pengelolaan-sampah.pdf>
- Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19. *Jurnal*

MAPPESONA, 17(1), p. 12.

Wachid, A., & Caesar, D. L. (2021).
Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Sampah di
Kabupaten Kudus. *J-KESMAS:
Jurnal Kesehatan Masyarakat*,
6(2), p. 173.
[https://doi.org/10.35329/jkesmas.
v6i2.1880](https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880)